

LAPORAN KONFERENSI “DEMOKRASI 2.0”

THE HABIBIE CENTER

6 DESEMBER 2007

DAN

IGADD ACTION PLAN 2008

DAFTAR ISI

1. **PENDAHULUAN:** Kerangka kerja dari IGADD dan konferensi 6 Desember 2007.
2. **GAGASAN KUNCI:** Konsep-konsep yang disampaikan pada konferensi tersebut.
3. **REKOMENDASI DAN LANGKAH BERIKUTNYA:** Rekomendasi yang dihasilkan oleh peserta konferensi dan bagaimana mewujudkannya ke dalam langkah aksi.

1. PENDAHULUAN

Konferensi tahunan yang diadakan oleh The Habibie Center pada 2007 lalu merupakan ajang brainstorming bagi IGADD. Lalu apakah IGADD itu sebenarnya? IGADD adalah sebuah kelompok institusi dari berbagai disiplin, beroperasi melalui sebuah sekretariat di The Habibie Center di Jakarta, Indonesia. Walaupun IGADD fokus pada Indonesia, namun formulasinya menggambarkan penerapan terbaik dari sepuluh tahun upaya menutup kesenjangan digital di seluruh dunia. Meskipun bekerja dengan seluruh pemegang kepentingan di dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Indonesia, fokus IGADD pada akhirnya adalah menghimpun dana dari para investor. Diketahui oleh Dr. Ilham Habibie, anak sulung mantan presiden B.J. Habibie, IGADD merupakan organisasi yang bersifat non-komersial, dilahirkan dari seminar sehari yang diadakan oleh The Harvard Club Indonesia pada 1994. Selain dari The Habibie Center, ITB dan DigitalDivide.org, IGADD juga akan beraliansi dengan pemerintah, misalnya dengan Depkominfo Republik Indonesia. Sekretariat IGADD adalah Institute for the Democratization and Socialization of Technology (IDST) yang terdapat di The Habibie Center.

Figur penting dalam pengembangan IGADD adalah Prof. Craig Warren Smith, penasihat Bill Gates di Seattle pada tahun 1998, yang merupakan pendiri gerakan global untuk menutup kesenjangan digital. Ketika menjadi profesor tamu dari Harvard yang berbasis di Singapura, Prof. Smith diundang ke Jakarta oleh Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu untuk membantu pemerintah dalam konferensi yang pertama kali memperkenalkan strategi Indonesia untuk menutup kesenjangan digital. Beberapa tahun kemudian, aktivitas yang dijalankannya membawa dirinya kepada IGADD yang didirikan secara formal sebagai program dari The Habibie Center pada tahun 2007. Bekerja paruh waktu di Jakarta, Prof. Smith dan tim akan menjalankan strategi IGADD ke depan pada tahun 2008.

2. GAGASAN KUNCI

CALL TO ACTION

Dalam pidato pembukaannya, Dr. Habibie menjelaskan bahwa perubahan fundamental dari sifat dasar demokratisasi berasal dari revolusi digital. Berbeda dengan situasi yang dihadapi oleh pencetus Konstitusi Amerika Serikat (Demokrasi 1.0), beliau beranggapan bahwa demokrasi pada masa ini telah kembali kepada filosofi Yunani (Demokrasi 0.0), menghasilkan paradigma baru dari proses demokratis.

Seperti dijelaskan dalam pidato pembukaannya, jantung dari gagasan tersebut adalah Web 2.0, yang merujuk pada situs internet yang memiliki kapasitas mengajak masyarakat luas untuk ikut terlibat dalam upaya mengasah pengalaman mereka, membangun identitas mereka sendiri dan memungkinkan mereka membentuk komunitas berdasarkan lokasi geografis tertentu atau atas dasar lainnya. Interaksi yang dijalankan tidak selalu dalam bentuk teks, tetapi dapat juga berbentuk virtual reality. Sebagai contoh, Second Life menciptakan suatu pengalaman baru yang menarik perhatian dari puluhan juta penggunanya. Google, Wikipedia, dan Facebook telah menghasilkan komunitas Web 2.0 yang terdiri dari ratusan juta pengguna dalam waktu singkat.

Dr. Habibie mengakhiri pidatonya dengan mendorong masyarakat untuk “menghidupkan” Web 2.0 di Indonesia sehingga dapat menguatkan demokrasi secara formal serta membawa pembelajaran yang melibatkan partisipasi ke dalam komunitas, sekolah, lembaga kesehatan dan berbagai institusi lainnya. Namun untuk mengubah masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang penuh partisipasi melalui rangsangan teknologi, para pemangku kepentingan di Indonesia harus terlebih dahulu menghadapi tantangan yang utama, yaitu menyediakan teknologi broadband yang dapat diandalkan, harganya terjangkau, dan mudah menyebar luas serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, konferensi tersebut telah menjadi sebuah seruan aksi.

PERSIAPAN UNTUK BRAINSTORMING

Setelah pidato dari Dr. Habibie, Wakil Ketua Bidang Riset The Habibie Center, Dr. Dewi Fortuna Anwar mempersiapkan peserta konferensi untuk sesi brainstorming. Beliau memperkenalkan fasilitator tiap kelompok diskusi. Sementara Prof. Smith memberikan penjelasan tentang proses yang dijalankan, Dr. Dewi meminta para peserta untuk mempertimbangkan rekomendasi dan tahapan langkah untuk mencapai 20% penetrasi broadband yang bermanfaat pada tahun 2012. Di luar itu, para peserta diberi pertanyaan tentang bagaimana pandangan masyarakat Indonesia pada tema tersebut, yang dapat

dilihat pada saat terjadi penyebaran internet kecepatan tinggi di Indonesia, baik sebelum maupun sesudahnya.

3. REKOMENDASI DAN LANGKAH BERIKUTNYA: TOPIK-TOPIK

Pada sesi selanjutnya, para peserta konferensi memberikan rekomendasi terkait dua topik: satu topik tentang infrastruktur teknologi dan satu topik lainnya mengenai Demokrasi 2.0 itu sendiri. Selanjutnya konferensi digelar dalam suasana yang lebih informal, dan rekomendasi yang diajukan beserta langkah berikutnya adalah sebagai berikut:

Topik #1: INOVASI TEKNOLOGI: *Seperti apa “ekosistem broadband” yang optimal bagi Indonesia, yang memungkinkan 50 juta masyarakat Indonesia mendapatkan akses internet kecepatan tinggi yang bermanfaat pada tahun 2012?*

Gambaran Permasalahan: Ada cukup banyak data yang menyebutkan bahwa Indonesia memiliki kualitas infrastruktur internet yang paling rendah, biaya koneksi internet yang paling tinggi, dan tingkat penetrasi broadband yang paling rendah di antara mayoritas negara Asia lainnya; penetrasi broadband Indonesia hanya sebesar 1%¹. Pada saat yang sama, data yang baru menyebutkan bahwa setiap upaya yang terorganisasi untuk mengurangi kemiskinan, melawan pemanasan global, menciptakan lapangan pekerjaan, memberi pendidikan pada masyarakat dan menjaga tradisi budaya semakin tergantung pada akses suatu negara terhadap teknologi broadband². Bagaimana kita dapat mengatasi masalah tersebut? Para peserta diskusi beranggapan bahwa teknologi yang paling efektif untuk meningkatkan penetrasi broadband adalah dengan menjadikan telepon selular sebagai access point untuk koneksi internet kecepatan tinggi (misalnya melalui GSM dan CDMA), serta mempertimbangkan penggunaan WiMax. Para peserta konferensi saling bertanya: Dapatkah infrastruktur teknologi dibangun di daerah pedesaan dari bawah ke atas, sebagaimana persebarannya dari atas ke bawah yang diawali dari kota? Bagaimana permintaan dapat ditingkatkan sehingga harga seluruh teknologi tersebut akan turun ke tingkat yang terjangkau? Bagaimana infrastruktur dapat dibangun dengan melihat penggunaan broadband yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Rekomendasi Terkait Topik #1: Peserta diskusi sepakat bahwa IGADD harus memulai dengan acuan dasar yang akurat untuk menentukan distribusi broadband di Indonesia saat ini. Lebih lanjut lagi, kita perlu membuat taksiran dari rencana saat ini untuk meningkatkan penetrasi broadband oleh sektor publik dan swasta sehingga kita dapat memerkirakan hasil yang dapat diraih pada tahun 2012, walaupun tanpa kehadiran dan campur tangan IGADD.

¹ Lihat World Information Society Report, 2006, International Telecommunications Union, hal.104.

² Lihat International Telecommunications Union, *World Information Technology Report, 2007*, bab 17.

Peserta diskusi menyimpulkan bahwa saat ini pun sebenarnya sudah mungkin meningkatkan jumlah pengguna internet Indonesia hingga mencapai 50 juta, namun dengan layanan dial-up yang lambat, hal itu tidak dapat diandalkan dan mahal. Untuk mencapai tingkat kecepatan broadband 128 kbps, 24 jam penuh, full IP, dengan biaya yang terjangkau di bawah 10 dollar per bulan, inovasi teknologi yang signifikan harus dibuat terlebih dahulu. Selain infrastruktur telepon biasa dan seluler, untuk mencapai target tersebut juga dibutuhkan prasarana yang berbasis satelit dengan akses full IP seperti WiMax, WiFi, Cma, dan sebagainya. Sarana-sarana tersebut dapat terhubung dengan terminal yang murah, yang dalam jumlah sangat besar dapat menurunkan biaya hingga di bawah 100 dollar dan tidak membutuhkan banyak tenaga. Sistem yang berbasis satelit ini juga dapat menyalurkan muatan-muatan di bidang pendidikan dan persyaratan sosial lainnya untuk menarik partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Satu gagasan adalah dengan menggunakan set-top box sebagai sentral dari infrastruktur tersebut.

Langkah Berikutnya:

- SEMINAR DEPKOMINFO: Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) Republik Indonesia menyelenggarakan seminar yang dihadiri oleh tim IGADD pada 14 Februari 2008 untuk membuat perhitungan yang lebih tepat dari target 2012, dibagi menurut berbagai lapisan masyarakat, e-government, e-learning, e-commerce, serta penggunaan koneksi oleh grup dan individu. Seminar ini kemudian akan menghasilkan suatu benchmark untuk memperkirakan tingkat keberhasilan IGADD dalam mencapai target 2012.
- PENELITIAN: Sebuah tim kajian yang dibentuk oleh Institute for the Democratization and Socialization of Technology - The Habibie Center akan mengkaji isu-isu teknologi yang dibutuhkan untuk meraih target 2012.

Topik #2: INOVASI FINANSIAL: *Bagaimana analisis keuangan yang inovatif dapat membantu tercapainya target 2012?*

Gambaran Permasalahan: Sudah jelas bahwa solusi permasalahan broadband yang dihadapi Indonesia tidak semata-mata dapat dipecahkan melalui pemilihan platform teknologi yang tepat, perangkat lunak maupun perangkat keras. Tidak juga dapat dipecahkan hanya melalui terobosan di bidang kebijakan publik. Namun solusi permasalahan tersebut juga memerlukan inovasi di bidang finansial. Dua pertanyaan penting yang terkait dengan topik ini dilontarkan kepada para peserta:

- Pertanyaan pertama mengenai model ekonomi, yaitu bagaimana memperhitungkan biaya serta return dari investasi untuk mencapai target 2012.

Pertanyaan yang paling penting adalah mengenai harga. Contoh yang paling baik untuk dilihat adalah India, yang biaya telepon seluler dan koneksi internetnya telah mengalami penurunan signifikan sejak tahun 1999. Dapatkah Indonesia mengikuti pola yang dijalankan India untuk menurunkan biaya layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi, sehingga para penyedia layanan dari sektor swasta dapat berkompetisi di segmen pasar konsumen dengan pendapatan sangat rendah?

- Pertanyaan kedua adalah bagaimana jasa keuangan dapat merambah ke masyarakat pedesaan di Indonesia yang tingkat pendapatannya rendah, agar dapat membantu usaha mereka dan meningkatkan penghasilan mereka sehingga pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan. Seorang ekonom dari Peru telah menunjukkan betapa pentingnya para petani memperoleh akses legal terhadap lahan mereka agar layak mendapatkan kredit dan mengurangi ketergantungan mereka terhadap lintah darat. Lebih lanjut, pertumbuhan global gerakan mikro kredit menekankan betapa pentingnya peranan kewirausahaan dalam upaya mengurangi kemiskinan di seluruh dunia.

Rekomendasi Terkait Topik #2: Rekomendasi yang diberikan terkait pertanyaan pertama (model finansial) adalah dengan bekerja bersama para ahli. Ada empat kelompok pakar yang dapat menjadi penasihat keuangan bagi IGADD:

- IGADD harus berkonsultasi dengan analis keuangan terkemuka dari bank lokal dan internasional yang beroperasi di Indonesia untuk mendapatkan saran dari mereka. Karena semua bank (baik ritel maupun bank investasi) akan diuntungkan dari terbukanya pasar akibat perluasan koneksi broadband, maka bank-bank tersebut pun mungkin akan bersedia menjadi penasihat keuangan untuk IGADD.
- IGADD juga harus bekerja dengan berbagai lembaga riset seperti Forrester Research, Gartner Research, IDC dan layanan komersial lainnya yang dapat melakukan analisis dengan baik tentang penetrasi IT di Asia pada masa yang akan datang.
- IGADD harus menjangkau para ahli bidang jasa keuangan di negara lain, seperti ICICI di India, yang dapat menerjemahkan pengalaman mereka di India, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Indonesia untuk memprediksi perkembangan broadband ke depan.
- IGADD harus merangkul bank investasi yang bersifat internasional, seperti Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch. Analis mereka dapat memberi

informasi kepada IGADD mengenai kriteria yang diinginkan oleh investor asing agar mereka tertarik untuk berinvestasi di bidang broadband Indonesia.

Rekomendasi lainnya terkait dengan upaya meningkatkan kualitas dan distribusi broadband serta manfaat jasa keuangan di Indonesia. Pada tahun 90-an, Hernando de Soto, seorang ekonom dari Peru, telah menunjukkan betapa pentingnya para petani memperoleh akses legal terhadap tanah mereka sendiri agar mereka layak mendapat kredit dan mengurangi ketergantungan terhadap lintah darat.

Seorang peserta menekankan perlunya diadakan suatu kampanye publik untuk mendidik, menyosialisasikan, memfasilitasi dan melatih masyarakat Indonesia agar mereka menyadari arti penting Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mengurangi kemiskinan. Peserta lain menekankan pentingnya membuat suatu perencanaan keuangan untuk telecenter (termasuk warnet) yang berperan sebagai sarana untuk e-commerce dan membantu para petani miskin untuk mendapat harga yang lebih baik dari hasil pertanian mereka. Gagasan lainnya adalah penggunaan sistem kartu identitas tunggal yang terintegrasi untuk memudahkan dan menyederhanakan transaksi keuangan. Ada juga pendapat yang diajukan tentang perlunya pemanfaatan secara optimal jaringan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah menjangkau hingga ke pelosok nusantara.

Dalam hal jasa keuangan yang dapat muncul dari penggunaan broadband, banyak peserta diskusi yang mengacu pada peluang meningkatkan efektifitas dan memperbesar skala mikro kredit di Indonesia, termasuk yang telah disediakan oleh BRI dan lembaga keuangan lainnya.

Satu gagasan yang cukup spesifik adalah IGADD perlu membangun kemitraan dengan Pusat Informasi Masyarakat untuk Pengembangan Produk Lokal Terbaik (sistem simpul yang dikembangkan ICMI). Dengan cara ini, broadband dapat diintegrasikan secara langsung dalam upaya mendapat harga yang lebih baik bagi para petani dalam menjual hasil panennya.

Gagasan lainnya adalah menggunakan metode scenario planning yang telah disempurnakan oleh Shell Oil Company untuk memerhitungkan arus keuangan dalam empat tahun mendatang untuk mencapai target 2012.

Langkah Berikutnya:

- IGADD harus membentuk penasihat keuangan yang terdiri dari bank ritel dan bank investasi untuk mendukung model ekonomi untuk mencapai target 2012.

- IGADD harus bekerja dengan para pemegang kepentingan dan mempelajari penerapan praktik-praktik terbaik dunia internasional dalam mengembangkan mikro kredit melalui broadband, dan menghubungkan pembiayaan bisnis kecil dengan mikro kredit di Indonesia.

Topik #3: INOVASI KEBIJAKAN PUBLIK: *Walaupun sektor swasta sepertinya memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk menyediakan koneksi broadband yang terjangkau, sektor publik perlu menciptakan kebijakan untuk bidang internet yang mampu mendorong sektor swasta mengambil tindakan dalam mengejar target 2012.*

Gambaran Permasalahan: Apakah dibutuhkan kebijakan-kebijakan publik yang baru untuk mendorong inovasi di bidang teknologi, keuangan dan investasi, yang dibutuhkan untuk mencapai target 2012? Apakah Indonesia membutuhkan bantuan dalam menerapkan atau menyempurnakan kebijakan-kebijakannya? Kebijakan publik antarlembaga pemerintah seperti apa yang relevan dengan pencapaian target 2012? Bagaimana pemerintah daerah dapat mengambil langkah untuk mempercepat penyebaran broadband?

Rekomendasi Terkait Topik #3: Beberapa peserta diskusi bersikeras bahwa pada akhirnya kebijakan kunci yang dibutuhkan adalah peningkatan dana anggaran untuk memenuhi investasi di bidang infrastruktur broadband. Tidak hanya infrastruktur di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, tapi juga untuk listrik dan prasarana lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung penggunaan broadband.

Beberapa orang berpendapat bahwa kebijakan kunci berada di tingkat daerah, karena hanya 5% dari kota atau kabupaten di Indonesia yang memiliki akses internet.

Beberapa orang menekankan pentingnya kebijakan publik yang berkaitan dengan persaingan. Mereka berpendapat bahwa operator telepon seluler milik pemerintah masih memiliki keunggulan kompetitif yang tidak adil bagi pendatang baru. Kebijakan yang baru dibutuhkan untuk menciptakan iklim persaingan yang lebih adil dan mencegah terjadinya permainan harga.

Beberapa peserta mengangkat tema cyber crime. Seorang peserta berkata, “Parlemen, yang didukung oleh pemerintah, harus membuat Undang-undang yang dapat menghukum pelaku cyber crime. Karena sampai sekarang kita belum punya peraturan perundangan yang cukup untuk memerangi cyber crime, terutama yang berkaitan dengan pornografi yang dapat merusak moral bangsa”.

Beberapa peserta diskusi menekankan pentingnya mereformasi dan menyempurnakan kebijakan pemerintah di bidang “universal services”, dimana 75% pendapatan dari sektor telekomunikasi harus digunakan untuk membangun infrastruktur di daerah pedesaan. Salah satu saran yang dilontarkan adalah dengan mendorong program-program di daerah yang didanai dari USO, yang berkaitan dengan kewirausahaan, broadband, dan mampu menarik investasi di tingkat daerah. Kemudian salah seorang peserta berkata, “Kebijakan USO harus diarahkan untuk community development di tingkat daerah, dan harus berdampak secara terukur pada peningkatan lapangan kerja dan investasi”.

Perhatian lainnya adalah bahwa kebijakan publik di bidang infrastruktur harus tetap berpegangan pada tujuan penggunaan yang ingin dicapai, misalnya untuk reformasi pendidikan dan e-health. Dan untuk mencapai hal itu diperlukan koordinasi yang lebih baik antara kebijakan di bidang broadband dan kebijakan yang mempromosikan aplikasi dan konten. Seorang peserta menambahkan, “Harus ada koordinasi yang berkelanjutan antara Departemen Komunikasi dan Informasi dan Departemen Dalam Negeri”.

Peserta lain berpendapat tentang pentingnya menyelaraskan kebijakan yang mengatur tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) dengan kebijakan yang berkaitan dengan universal service.

Topik #4: PENDIDIKAN DENGAN BROADBAND: *Bagaimana Indonesia dapat menerapkan pendidikan yang lebih efektif, partisipatif dan interaktif dengan skenario dimana 50 juta penduduk terhubung dengan internet kecepatan tinggi pada tahun 2012?*

Gambaran Permasalahan: Bagaimana hal itu bisa dilakukan sehingga dapat meningkatkan kualitas guru dan kurikulum, serta merangsang interaksi yang lebih efektif antara pendidikan dasar dengan pendidikan tinggi?

Rekomendasi Terkait Topik #4: Beberapa peserta, seperti Prof. Arief Rachman, berpendapat bahwa pemerintah perlu membuat kebijakan baru untuk mempromosikan sistem belajar yang bersifat partisipatif dengan memanfaatkan teknologi broadband. Kurikulum pendidikan sekarang yang bersifat kaku dan pasif harus diganti dengan pendekatan yang interaktif dimana siswa, pengajar dan orang tua berperan aktif sebagai mitra.

Rekomendasi lainnya diberikan oleh Prof. Hafid Abbas, terkait pentingnya para guru mengajarkan pendidikan kewarganegaraan dan menghasilkan muatan lokal (local content) dengan bahasa lokal. Beberapa pendapat juga dilontarkan mengenai pentingnya pendidikan jarak jauh (distanced learning) untuk meningkatkan kualitas pengajar. Prof. Riza Wahono menekankan peranan penting yang dapat dijalankan oleh permainan

komputer di sekolah, jika broadband dapat tersedia secara luas. Bapak Engkos Koswara berpendapat pentingnya mengajak para ahli di bidang bisnis dan teknologi untuk terlibat dalam “Pendidikan Teknologi Informasi” yang dijalankan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan telah melaksanakan tujuh program. Program nasional tersebut perlu diselaraskan dengan pemerintah di tingkat daerah. Beberapa peserta mengangkat pentingnya teknologi baru dapat menjadi sarana untuk memperbaiki ujian bagi para siswa. Bapak Leo Aldianto berpendapat bahwa telecenter harus diintegrasikan ke dalam sekolah-sekolah sehingga fasilitas tersebut dapat juga berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan kewirausahaan.

Langkah Berikutnya:

- Sebagai salah satu mitra IGADD, rektor ITB akan menggelar suatu forum bersama dengan rektor dari universitas ternama lainnya di Indonesia, untuk mempertimbangkan implikasi penyebaran broadband 20% pada tahun 2012 bagi pendidikan dasar, menengah dan tinggi di Indonesia. Acara yang rencananya digelar di Bandung pada 18 Maret 2008 itu akan mencakup diskusi tentang peranan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi dalam infrastruktur broadband. Termasuk juga diskusi mengenai inovasi di bidang penelitian, kurikulum, pelatihan dan berbagai bidang seperti pendidikan manajemen yang keseluruhannya mengacu pada perkembangan dan persebaran teknologi broadband pada tahun 2012.

Topik #5: MEDIA: *Media di Indonesia adalah pemegang kepentingan utama dari teknologi broadband. Berkaitan dengan strategi IGADD terhadap media, ada dua isu yang mengemuka.*

Gambaran Permasalahan: Ada dua aspek yang menjadi pertimbangan dari topik ini:

- Kebijakan media mengenai Web 2.0: Kombinasi media cetak dan media internet yang dikenal masyarakat saat ini akan berubah sepenuhnya ketika media internet menyebar luas di Indonesia. Seperti yang dapat kita lihat di negara-negara maju, blog dan situs jaringan sosial secara pesat telah menggantikan media tradisional. Dan format media yang baru akan terbentuk ketika perusahaan-perusahaan media (seperti News Corp) mengakuisisi media yang baru (seperti MySpace). Pada beberapa kasus, ketika format media yang baru itu muncul, bentuk baru dari partisipasi masyarakat akan timbul dalam kombinasi kekuatan yang berbeda dari media lama dan baru.

- Media sebagai sumber dari informasi publik dan sosialisasi mengenai kebutuhan yang mendesak untuk meraih target 20% koneksi pada tahun 2012. Karena topik mengenai teknologi broadband sepertinya tidak terlalu penting bagi kebanyakan masyarakat, para reporter dan editor yang berwawasan luas dapat menjalankan peran untuk menanamkan pengetahuan akan pentingnya isu tersebut. Hal itu dapat menjelaskan peluang yang dapat diraih oleh Indonesia jika tujuan 20% koneksi pada tahun 2012 tercapai, serta menjelaskan masalah-masalah yang dapat timbul jika Indonesia tidak melangkah ke masa depan dengan bantuan teknologi internet kecepatan tinggi yang menyebar luas.

Rekomendasi Terkait Topik #5: Para peserta merekomendasikan agar IGADD mengadakan pertemuan dengan perusahaan-perusahaan media terbesar di Indonesia untuk menjelaskan strategi IGADD dalam meraih target 20% koneksi pada tahun 2012 serta membantu mereka menemukan cara untuk mengangkat isu tersebut.

Para peserta juga merekomendasikan IGADD merangkul para bloggers Indonesia, termasuk juga Detikcom (pelopor media baru Indonesia) untuk memperoleh dukungan dan peran serta mereka dalam meraih target 2012.

Langkah Berikutnya:

IGADD akan menjadi bahan diskusi media dengan para penulis dan editor, terkait dengan kondisi broadband di Indonesia dan peranan media dalam mengangkat isu 2012.

Topik #6: ALUMNI: *Apakah peran alumni dan klub alumni dari universitas dalam dan luar negeri pada pencapaian target 2012 dan mewujudkan Demokrasi 2.0?*

Gambaran permasalahan: Para alumni berpendidikan tinggi yang berasal dari universitas ternama di dalam dan luar negeri merupakan sumber daya yang sangat penting bagi IGADD. Bahkan sebenarnya konsep IGADD lahir dari pertemuan Harvard Club Indonesia pada tahun 2004. Para peserta yang mewakili berbagai klub alumni Indonesia mendiskusikan peranan mereka terkait tujuan 2012 dan menghasilkan beberapa rekomendasi.

Rekomendasi Terkait Topik #6:

- Para alumni dapat berperan serta dalam meningkatkan pengembangan sumber daya manusia dan pertumbuhan lapangan kerja dengan menyosialisasikan informasi melalui jaringan alumni.
- Program eksekutif MBA dapat didirikan untuk mentransfer keahlian-keahlian manajemen yang dibutuhkan untuk mentransformasikan broadband menjadi pertumbuhan pasar. Inovasi ini dapat diwujudkan melalui kerjasama antara universitas dalam dan luar negeri dengan menggunakan modul terbaru dan didukung oleh jaringan alumni dengan mengundang para profesor untuk memberikan kuliah umum baik secara fisik maupun virtual.
- Alumni dapat menyediakan sumber daya teknologi dari universitas di luar negeri dengan menyosialisasikan materi kuliah secara gratis yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Langkah berikutnya:

- Sebuah rencana telah dipersiapkan untuk berbagai klub alumni (yang memiliki perwakilan di Indonesia) dari berbagai universitas ternama luar negeri—Harvard , MIT, Stanford, University of Chicago, Boston University dan yang lainnya—guna merumuskan peranan mereka dalam menyukseskan agenda 2012. Peran berbagai klub alumni tersebut dapat dipertimbangkan dari sisi networking di dalam negeri sendiri dan juga untuk melibatkan mahasiswa dan profesor Indonesia di berbagai universitas di luar negeri.
- Bagaimana upaya melibatkan alumni ITB, UI dan universitas ternama lainnya di dalam negeri akan menjadi agenda dalam pertemuan rektor guna membahas strategi IGADD, yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2008 di ITB.